

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. *Grand Theory***

###### **a. Teori Institusional**

Pemikiran yang mendasari teori institusional adalah didasari pada pemikiran bahwa untuk bertahan hidup. Organisasi harus meyakinkan kepada publik atau masyarakat bahwa organisasi adalah entitas yang sah (*legitimate*) serta layak untuk didukung. Teori ini juga digunakan untuk menjelaskan tindakan dan pengambilan keputusan dalam organisasi publik. Teori institusional berpendapat bahwa organisasi yang mengutamakan legitimasi akan memiliki kecenderungan untuk berusaha menyesuaikan diri pada harapan eksternal atau harapan sosial dimana organisasi berada. Penyesuaian pada harapan eksternal atau harapan sosial mengakibatkan timbulnya kecenderungan organisasi untuk memisahkan kegiatan internal dan berfokus pada sistem yang sifatnya simbolis pada pihak eksternal. Organisasi publik yang cenderung untuk memperoleh legitimasi akan cenderung memiliki kesamaan atau isomorfisme dengan organisasi publik lain (Ridha dan Basuki, 2012).

**b. Teori Isomorfisme Institusional**

Isomorfisme adalah proses yang mendorong satu unit dalam suatu populasi untuk menyerupai unit yang lain dalam menghadapi kondisi lingkungan yang sama. Penelitian terbaru telah menekankan bagaimana organisasi publik menjadi subjek tekanan institusional yang mendalam sehingga menyebabkan pada umumnya organisasi publik menjadi lebih mirip (Ashworth *et al*, 2009). Teori institusional organisasi memprediksi bahwa organisasi akan menjadi lebih serupa karena tekanan institusional, baik dikarenakan adanya koersif, normatif, dan mimetik (Ridha dan Basuki, 2012).

**c. Teori *Stewardship***

Teori *stewardship* memandang bahwa manajemen sebagai pihak yang dapat dipercaya oleh publik untuk melakukan tindakan yang baik dan berguna untuk kepentingan bersama baik secara khusus maupun umum. Implikasi dari teori *stewardship* pada penelitian ini adalah pemerintah. Pemerintah akan bekerja sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyatnya dalam hal transparansi pelaporan keuangan. Pemerintah atau badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat dan benar. Seperti memberikan atau menerbitkan informasi mengenai laporan keuangan dan pelaporan keuangan yang mudah dijangkau oleh publik (Puspitarini, 2010).

Teori *stewardship* mengasumsikan bahwa hubungan yang baik dapat dilihat dari kepuasan pemilik terhadap organisasi yang dijelankannya. Melindungi dan mengoptimalkan kekayaan organisasi dengan prestasi merupakan tugas dari seorang *steward*. Berhasilnya tugas yang dilakukan oleh *steward* akan memaksimalkan fungsi-fungsi utilitas. Asumsinya seorang *steward* harus meluruskan tujuan-tujuan sesuai dengan keinginan pemilik. Hal ini bukan berarti *steward*, tidak memiliki kelangsungan hidup (Irmawati dan Pratolo, 2013).

**d. Teori *Signaling***

Teori *signaling* mengasumsikan bahwa pemerintah harus berusaha untuk memberikan dan mentransfer signal yang baik kepada masyarakat. Karena pemerintah salah satu pihak yang diberikan amanah dan tanggung jawab oleh masyarakat (Abdullah dan Halim, 2006).

Signal yang harus diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yaitu berupa laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan yang andal, lengkap, detail, berkualitas, dan disajikan dalam *website* pemerintah daerah. Suatu kinerja yang baik dari pemerintah harus di informasikan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban (Puspita dan Martani, 2012). Dalam pemerintahan terdapat kinerja yang baik yaitu perlu menginformasikan kepada masyarakat, baik dalam bentuk pertanggung jawaban, laporan keuangan, dan bentuk-

bentuk bantuan yang digunakan dalam kesejahteraan umum (Abdullah dan Halim, 2006).

Teori *signaling* memiliki kerangka teori yang di dalamnya menyebutkan bahwa suatu dorongan untuk memberikan informasi yaitu, terjadinya asimetri informasi antara pemerintah daerah dengan pihak luar, khususnya masyarakat. Pemerintah daerah harus mengurangi asimetri informasi yang terjadi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dari masyarakat (Pratama dkk, 2015).

**e. Teori *Stakeholder***

*Stakeholder* merupakan sebuah pihak, baik pihak internal maupun eksternal yang bersifat langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi maupun dipengaruhi dalam suatu hubungan. Pihak internal maupun eksternal *stakeholder* meliputi lembaga swadaya masyarakat, para pekerja, dan lain sebagainya yang keberadaannya sangat mempengaruhi dan dipengaruhi (Dyah, 2012).

Batasan *stakeholder* di atas menunjukkan bahwa pemerintah hendaknya memperhatikan *stakeholder*, karena mereka adalah pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung atas aktivitas yang dilakukan. Bukan berarti suatu pemerintahan tidak memperhatikan *stakeholder*, akan menuai protes dan legitimasi *stakeholder*. Asumsi dari teori *stakeholder*, bahwa

pemerintah tidak dapat melepaskan diri dengan lingkungan sosial sekitarnya (Dyah, 2012).

## **2. Transparansi Pelaporan Keuangan**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Informasi yang terbuka tentang *input*, *output* dan *outcome*. Transparansi merupakan salah satu sarana untuk menyusun akuntabilitas administratif kepada publik. Salah satu kunci untuk mewujudkan *good government governance* yaitu adanya transparansi. Transparansi yang berupa kebebasan pada setiap orang untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah. Seperti pengelolaan keuangan publik dan penjaminan akses, dengan adanya keterbukaan dalam informasi diharapkan dapat menghasilkn perlawanan politik yang sehat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah dibuat dalam preferensi kebutuhan masyarakat (Arfianto, 2016).

Menurut Medina (2013), terdapat beberapa keuntungan dengan adanya transparansi dalam pemerintahan antara lain :

1. Membangun hubungan sosial yang baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Misalnya, dapat menerima keputusan atau kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan masyarakat dapat mendukung kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan.

2. Meningkatkan iklim investasi, memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat yang awam mengenai tindakan pemerintah akan mendatangkan investor-investor.
3. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Jika keputusan-keputusan yang diambil dilakukan secara terbuka dan transparan maka, pejabat publik akan lebih bertanggungjawab dalam keputusan-keputusan yang telah ditetapkan. Sehingga, dapat mencegah adanya kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Instruksi Mendagri No.188.52/1797/SJ/2012 mewajibkan untuk menyediakan sarana dalam bentuk *website* resmi pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah memiliki *website* resmi, diinstruksikan agar menyiapkan menu konten dengan nama Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah dan diharuskan mengunggah dokumen anggaran daerah pada *website* resmi. Organisasi yang mengedepankan adanya transparansi publik akan rentan adanya kritik dari pemangku kepentingan, karena para pemangku kepentingan dapat melihat gambaran organisasi secara terbuka (Rawlins, 2008).

Transparansi pelaporan keuangan pada penelitian ini adalah terkait semua upaya Organisasi Perangkat Daerah mengenai laporan informasi keuangan yang dapat dirilis secara legal baik positif atau negatif, akurat, andal, berkualitas dan tepat waktu dengan tujuan untuk mempertahankan

tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah atas kebijakan, praktik-praktik dan tindakan yang telah dilakukan (Ridha dan Basuki, 2012).

### **3. Tekanan Eksternal**

Tekanan eksternal merupakan hasil dari tekanan informal dan tekanan formal. Tekanan-tekanan tersebut dapat mempengaruhi struktur organisasi maupun kegiatan organisasi. Faktor eksternal berupa peraturan organisasi lain seperti pemerintah pusat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lembaga-lembaga lain. Peraturan-peraturan yang berasal dari luar organisasi juga bisa didapat melalui media massa seperti media cetak, media elektronik, dan media massa internet atau pemberitahuan dari organisasi itu sendiri. Peraturan ditujukan untuk mengatur praktik-praktik agar menjadi lebih baik. Suatu peraturan dapat menyebabkan kecenderungan organisasi untuk memperoleh atau memperbaiki legitimasi (Ridha dan Basuki, 2012).

Tekanan eksternal yang diberikan oleh pemerintah, peraturan atau lembaga lain untuk mengadopsi struktur atau sistem merupakan kekuatan koersif (Ashworth, 2009). Sebuah peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebenarnya mempunyai tujuan untuk menjadikan praktik-praktik di dalam organisasi (Organisasi Perangkat Daerah) menjadi lebih baik. Sebuah organisasi yang mengalami perubahan didasari adanya kekuatan koersif, menyebabkan organisasi akan mempertimbangkan pengaruh politik daripada pengaruh teknis (Ashworth,

2009). Adanya dorongan dari luar organisasi dapat membuat pemerintah semakin meningkatkan pelayanan publik, khususnya dalam hal transparansi (Ridha dan Basuki, 2012).

#### **4. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia adalah suatu potensi yang terdapat pada diri manusia. Potensi tersebut bisa berupa keahlian atau kompetensi yang dimiliki masing-masing individu dan mungkin dari setiap individu tersebut, memiliki perbedaan keahlian/kompetensi atau bahkan sama. Potensi sangat berguna di dalam dunia kerja, karena dalam lingkungan kerja harus memiliki keahlian/kompetensi yang sesuai dengan pekerjaannya, dengan tujuan dapat memberikan kontribusi secara maksimal (Prasetya, 2015).

Para aparatur di Organisasi Perangkat Daerah harus mempunyai latar belakang pendidikan di bidang akuntansi dan juga memiliki pengalaman yang berhubungan dengan keuangan agar dalam praktiknya tidak terjadi kekeliruan. Diduga masih banyak daerah yang belum memberlakukan transparansi diakibatkan karena masih sedikitnya sumber daya manusia di bidang akuntansi yang mengakibatkan banyak terjadinya kesalahan dalam sistem akuntansi. Kegagalan dari sumber daya manusia tersebut dapat mengacu timbulnya kekeliruan pada laporan keuangan yang mengakibatkan laporan keuangan menjadi tidak sesuai dengan standar yang di tetapkan oleh pemerintah (Arfianti, 2011).



## 5. Komitmen Manajemen

Komitmen dapat diartikan juga sebagai kecenderungan merasa aktif dalam suatu kegiatan yang melekat pada diri individu (Purnamasari, 2016). Manajemen merupakan seseorang yang mempunyai tanggung jawab atas semua kegiatan yang ada pada organisasi dan jalannya organisasi, dalam organisasi manajemen harus melaksanakan pengendalian dan pengorganisasian dengan penuh tanggung jawab. Sehingga dapat mencapai tujuan yang efektif dan efisien (Silvia, 2013).

Perubahan institusional dapat berdampak pada masalah karakter dan integritas organisasi. Strategi integritas merupakan sesuatu yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih menuntut daripada inisiatif kepatuhan atas hukum. Suatu peraturan dan kepatuhan akan terwujud bila diikuti oleh komitmen manajemen yang kuat (Ridha dan Basuki, 2012).

Komitmen manajemen adalah suatu keyakinan dan dukungan dari manajemen untuk meyakinkan individu-individu dalam menjalankan, melakukan, dan mengimplementasikan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Sehingga dengan diterapkannya kebijakan-kebijakan, organisasi dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Adanya komitmen manajemen, maka kinerja yang ada di dalam organisasi tersebut akan lebih baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya (Silvia, 2013).

## 6. Ketidakpastian Lingkungan

Ketidakpastian lingkungan dalam hal ini adalah kondisi dimana OPD mengalami ketidakpastian yang dapat disebabkan adanya pengaruh dari luar OPD, seperti sering terjadinya perubahan peraturan, tidak match-nya antara peraturan yang satu dengan yang lain, terjadinya mutasi staf OPD yang cepat, dan lain sebagainya. OPD dituntut untuk menyesuaikan diri dengan kondisi dengan kondisi yang ada, baik dalam praktik maupun operasionalnya. Praktik yang dimaksud dalam penelitian ini dikhususkan pada penerapan transparansi pelaporan keuangan (Ridha dan Basuki, 2012).

Menurut Masruroh (2015), ketidakpastian lingkungan merupakan keterbatasan individu dalam menilai probabilitas gagal atau berhasilnya keputusan yang telah dibuat. Ketidakpastian lingkungan adalah situasi seseorang yang terkendala untuk memprediksi situasi di sekitarnya sehingga mencoba untuk melakukan sesuatu untuk menghadapi ketidakpastian tersebut. Pada kondisi ketidakpastian tinggi, individu sulit untuk memprediksi kegagalan dan keberhasilan dari keputusan yang dibuatnya. Ketidakpastian dapat disebabkan oleh berbagai hal di luar organisasi, seperti perubahan peraturan yang cepat dalam satu rentang waktu tertentu, adanya peraturan yang berbeda antara satu dengan yang lain, dan sebagainya.

Perubahan organisasi baik proses ataupun strukturnya yang terdapat pada organisasi, tidaklah mudah dalam ketidakpastian lingkungan untuk dijadikan sebagai respon. Ketidakpastian di dalam organisasi juga dapat menimbulkan pemahaman yang rendah dalam menerapkan peraturan-peraturan yang baru. Organisasi yang tidak pasti kondisinya, pemimpin organisasi lebih memutuskan untuk meniru organisasi yang dianggap lebih unggul dan berhasil dalam menerpakan peraturan-peraturannya (Ridha dan Basuki, 2012).

Transparansi pelaporan keuangan mengharuskan organisasi untuk menyajikan laporan keuangan yang bebas dari salah material dan informasi yang bias kepada pihak luar. Oleh karena itu, transparansi akan mendorong organisasi untuk mengungkapkan informasi secara penuh tentang proses maupun praktiknya dalam laporan keuangan untuk memenuhi prasyarat kualitas keterandalan (*reliability*) (Ridha dan Basuki, 2012).

## **B. Hasil Penelitian Terdahulu**

Pramita dan Khikmah (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh tekanan eksternal, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan komitmen manajemen terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Penelitian ini memiliki variabel independen yaitu tekanan eksternal, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan komitmen manajemen. Sedangkan variabel dependen yaitu transparansi pelaporan keuangan. Penelitian dilakukan pada

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang, hasil penelitian bahwa tekanan eksternal, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Putra (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh tekanan eksternal, pengendalian internal, ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen dan kompetensi sumber daya manusia terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Penelitian ini memiliki variabel independen yaitu tekanan eksternal, pengendalian internal, ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen dan kompetensi sumber daya manusia. Sedangkan variabel dependen yaitu transparansi pelaporan keuangan. Penelitian dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, hasil penelitian bahwa tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan, sedangkan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Purnamasari (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh sumber daya manusia, tekanan eksternal, komitmen manajemen terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Penelitian ini memiliki variabel independen yaitu sumber daya manusia, tekanan eksternal, dan komitmen manajemen. Sedangkan variabel dependen yaitu transparansi pelaporan keuangan. Penelitian dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Situbondo, hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap transparansi pelaporan keuangan, sedangkan tekanan eksternal dan komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap transparansi pelaporan keuangan.

Masruroh (2015) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi pelaporan keuangan. Penelitian ini memiliki variabel independen yaitu tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, dan komitmen manajemen. Sedangkan variabel dependen yaitu transparansi pelaporan keuangan. Penelitian dilakukan pada Pemerintah Kota Mojokerto, hasil penelitian bahwa tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan dan komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Dewi, dkk (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh tekanan eksternal, faktor politik dan komitmen manajemen terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Penelitian ini memiliki variabel independen yaitu tekanan eksternal, faktor politik, dan komitmen manajemen. Sedangkan variabel dependen yaitu transparansi pelaporan keuangan. Penelitian dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem, hasil penelitian bahwa tekanan eksternal dan faktor politik berpengaruh negatif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan, sedangkan komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Hastuti (2015) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan. Penelitian ini memiliki variabel independen yaitu penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, pengendalian internal, tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen, dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja. Sedangkan variabel dependen yaitu transparansi pelaporan keuangan. Penelitian dilakukan pada Kabupaten Boyolali, hasil penelitian bahwa penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, pengendalian internal, tekanan eksternal, komitmen manajemen, dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan, sedangkan ketidakpastian lingkungan berpengaruh negatif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Satyaningsih, dkk (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan ketidakpastian lingkungan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Penelitian ini memiliki variabel independen yaitu anggaran berbasis kinerja dan ketidakpastian lingkungan. Sedangkan variabel dependen yaitu transparansi pelaporan keuangan. Penelitian dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung, hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja dan ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Fardian (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh faktor politik, ketidakpastian lingkungan, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Penelitian ini memiliki variabel independen yaitu faktor politik, ketidakpastian lingkungan, dan kompetensi sumber daya manusia. Sedangkan variabel dependen yaitu transparansi pelaporan keuangan. Penelitian dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang, hasil penelitian bahwa faktor politik, ketidakpastian lingkungan, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Sihaloho (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, dan komitmen manajemen terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Penelitian ini memiliki variabel independen yaitu tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, dan komitmen manajemen. Sedangkan variabel dependen yaitu transparansi pelaporan keuangan. Penelitian dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, hasil penelitian bahwa tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan dan komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Ridha dan Basuki (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, dan komitmen manajemen terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Penelitian ini memiliki variabel independen yaitu tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, dan komitmen

manajemen. Sedangkan variabel dependen yaitu transparansi pelaporan keuangan. Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota D.I. Yogyakarta, hasil penelitian bahwa tekanan eksternal dan komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan, sedangkan ketidakpastian lingkungan berpengaruh negatif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

### **C. Hipotesis**

#### **1. Pengaruh Tekanan Eksternal Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan**

Tekanan eksternal merupakan hasil dari tekanan informal dan tekanan formal. Tekanan-tekanan tersebut dapat mempengaruhi struktur organisasi maupun kegiatan organisasi. Tekanan eksternal diperlukan dalam transparansi pelaporan keuangan karena, adanya dorongan dari luar organisasi akan menjadikan praktik-praktik di dalam organisasi (Organisasi Perangkat Daerah) menjadi lebih baik dan tercapainya tujuan organisasi. Dorongan dari luar organisasi juga dapat membuat pemerintah semakin meningkatkan pelayanan publik, khususnya dalam hal transparansi (Ridha dan Basuki, 2012).

Isomorfisme koersif selalu terkait dengan hal yang berhubungan dengan lingkungan di sekitar organisasi. Isomorfisme koersif merupakan hasil dari tekanan formal dan informal yang diberikan pada organisasi oleh organisasi lain dimana organisasi tergantung dengan harapan budaya



masyarakat untuk menjalankan fungsinya. Isomorfisme koersif berasal dari pengaruh politik dan kebutuhan untuk legitimasi (Ridha dan Basuki, 2012).

Tekanan eksternal berkaitan dengan teori *signaling* yaitu pemerintah harus memberikan signal kepada pihak eksternal, sehingga dengan adanya signal dapat memberikan pemikiran yang baik bagi pihak eksternal terhadap apa yang dilakukan pemerintah dan tercapainya tujuan organisasi. Tekanan eksternal juga berkaitan dengan teori *stakeholder* yaitu mengenai pemangku kepentingan menuntut organisasi untuk lebih transparan dalam praktiknya, tidak dalam jumlah yang dirilis saja akan tetapi, bagaimana organisasi menjalankan operasionalnya (Silver, 2005).

Penelitian Pramita dan Khikmah (2016) yang dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Magelang menunjukkan tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Penelitian Purnamasari (2016) yang dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Situbondo menunjukkan tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Penelitian Masruroh (2015) yang dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Mojokerto menunjukkan tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Kekuatan pengendalian sosial yang cenderung memaksa, dari suatu peraturan juga dapat menyebabkan adanya kecenderungan organisasi untuk memperoleh dan memperbaiki legitimasi. Perubahan organisasi yang dipengaruhi faktor dari luar organisasi akan mengakibatkan praktik-praktik yang terjadi dalam organisasi menjadi lebih baik. Suatu peraturan dapat menyebabkan kecenderungan organisasi untuk memperoleh atau memperbaiki legitimasi. Semakin tinggi tekanan eksternal yang diberikan maka, semakin meningkat pelayanan publik khususnya dalam hal transparansi (Ridha dan Basuki, 2012). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan eksternal dapat membantu penerapan transparansi pelaporan keuangan meningkat di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diduga bahwa penerapan transparansi pelaporan keuangan dipengaruhi oleh tekanan eksternal. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut :

**H<sub>1</sub> : Tekanan eksternal berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.**

## **2. Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan**

Sumber daya manusia adalah suatu potensi yang terdapat pada diri manusia. Potensi tersebut bisa berupa keahlian atau kompetensi yang dimiliki masing-masing individu dan mungkin dari setiap individu

tersebut, memiliki perbedaan keahlian/kompetensi atau bahkan sama. Sumber daya manusia diperlukan dalam transparansi pelaporan keuangan karena, kompetensi dan keahlian yang dimiliki individu dalam bidang akuntansi yang nantinya akan dipergunakan untuk mencapai aspek akuntabilitas dan transparansi (Prasetya, 2015). Semakin banyak sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang akuntansi maka, semakin berkualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah dan penerapan transparansi pelaporan keuangan akan berjalan dengan baik.

Sumber daya manusia berkaitan dengan teori *stewardship* yaitu, pemerintah pasti akan memberikan kualitas laporan keuangan yang baik bagi pengguna laporan keuangan. Diasumsikan bahwa pembuat laporan keuangan adalah seorang manajer, jadi manajer harus memberikan akses yang mudah bagi publik untuk mendapatkan laporan keuangan.

Penelitian Fardian (2014) yang dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Padang menunjukkan sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia dapat membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga penerapan transparansi pelaporan keuangan dapat berjalan dengan baik.

Sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi pada organisasi harus memiliki kualitas yang disyaratkan, sehingga informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi kualitasnya menjadi baik.

Pegawai yang memiliki pemahaman yang tinggi terhadap tugas dan fungsinya dapat berdampak baik pada penyajian laporan keuangan (Purnamasari, 2016).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diduga bahwa penerapan transparansi pelaporan keuangan dipengaruhi oleh sumber daya manusia. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut :

**H<sub>2</sub> : Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.**

### **3. Pengaruh Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan**

Komitmen manajemen adalah suatu keyakinan dan dukungan dari manajemen untuk meyakinkan individu-individu dalam menjalankan, melakukan, dan mengimplementasikan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Komitmen manajemen diperlukan dalam penerapan transparansi pelaporan keuangan karena, dalam penerapan transparansi diperlukan pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya organisasi dalam melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya manusia. Sehingga dapat tercapai sasaran organisasi secara efektif, dengan mencapai sasaran yang efektif transparansi dapat diterapkan seiring berjalannya waktu (Saputra, 2015).

Isomorfisme normatif terkait dengan profesionalisme. Perubahan institusional dapat berdampak pada masalah karakter dan integritas

organisasi. Strategi integritas merupakan sesuatu yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih menuntut daripada inisiatif kepatuhan atas hukum. Kepatuhan atas hukum dan peraturan akan terwujud bila diikuti oleh komitmen manajemen yang kuat (Ridha dan Basuki, 2012).

Komitmen manajemen berkaitan dengan teori *stewardship* yaitu manajemen harus menjadi pimpinan yang berkomitmen dan bertanggung jawab atas jalnnya organisasi. Sehingga organisasi dapat berjalan sesuai dengan proses perencanaan dan tujuan organisasi (Dyah, 2012).

Penelitian Pramita dan Khikmah (2016) yang dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Magelang menunjukkan bahwa komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Penelitian Purnamasari (2016) yang dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Situbondo menunjukkan komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Penelitian Masruroh (2015) yang dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Mojokerto menunjukkan bahwa komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Penelitian Dewi, dkk (2015) yang dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Karangasem menunjukkan bahwa komitmen manajemen berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Proses di dalam organisasi untuk menetapkan suatu karakter ditentukan dari komitmen manajemen organisasi dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang ada pada organisasi. Transparansi merupakan suatu prinsip yang harus dipegang oleh organisasi untuk pengelolaan keuangan. Semakin tinggi komitmen yang ada pada organisasi maka, semakin tinggi prinsip yang harus dipegang dalam organisasi (Dacin, 2002). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen manajemen dapat membantu penerapan transparansi pelaporan keuangan meningkat di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diduga bahwa penerapan transparansi pelaporan keuangan dipengaruhi oleh komitmen manajemen. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut :

**H<sub>3</sub> : Komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.**

#### **4. Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan**

Ketidakpastian lingkungan dalam hal ini adalah kondisi dimana OPD mengalami ketidakpastian yang dapat disebabkan adanya pengaruh dari luar OPD, seperti sering terjadinya perubahan peraturan, tidak match-nya antara peraturan yang satu dengan yang lain, terjadinya mutasi staf OPD yang cepat, dan lain sebagainya. OPD dituntut untuk menyesuaikan diri dengan kondisi dengan kondisi yang ada, baik dalam praktik maupun

operasionalnya. Praktik yang dimaksud dalam penelitian ini dikhususkan pada penerapan transparansi pelaporan keuangan (Ridha dan Basuki, 2012).

Isomorfisme mimetik adalah kecenderungan untuk memodelkan dirinya pada perilaku organisasi lain dan muncul sebagai tanggapan untuk suatu ketidakpastian atas suatu standar tertentu. Isomorfisme mimetik termasuk didalamnya *benchmarking* dan mengidentifikasi praktik terbaik yang ada dilapangan. Ketidakpastian dapat disebabkan oleh berbagai hal di luar organisasi, seperti perubahan peraturan yang cepat dalam satu rentang waktu tertentu, adanya peraturan yang berbeda antara satu dengan yang lain, dan sebagainya (Ridha dan Basuki, 2012).

Ketidakpastian lingkungan berkaitan dengan teori *signaling* yaitu pemimpin harus memberikan atau mentransfer signal yang baik kepada bawahan. Asumsinya bahwa pemerintah harus memberikan signal kepada masyarakat maupun pekerja-pekerja yang ada di Organisasi Perangkat Daerah, berupa laporan keuangan dan pemberitahuan yang berkaitan dengan masalah Organisasi Perangkat Daerah. Sehingga tidak akan terjadi keterandalan dalam transparansi pelaporan keuangan.

Transparansi pelaporan keuangan mengharuskan organisasi untuk menyajikan laporan keuangan yang bebas dari salah saji material dan informasi yang bias kepada pihak luar. Hal tersebut sesuai dengan konsep keterandalan (*reliability*) yang mana informasi dalam laporan keuangan

harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Keterandalan dipengaruhi oleh ketidakpastian dari item-item yang diakui dan diukur dalam laporan keuangan. Organisasi akan menyajikan struktur formal dari akun-akun yang bisa diterima atas setiap kegiatan organisasi, guna memenuhi harapan masyarakat (Ridha dan Basuki, 2012).

Penelitian Masruroh (2015) yang dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Mojokerto menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Penelitian Satyaningsih, dkk (2014) yang dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Klungkung menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan meneliti apakah ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis keempat sebagai berikut :

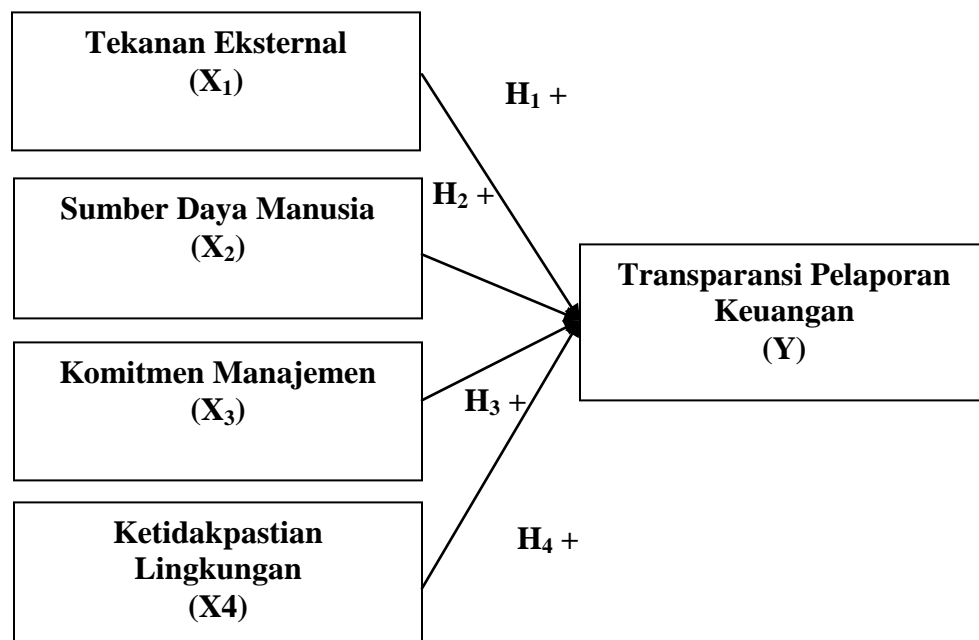
**H<sub>4</sub> : Ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.**

#### **D. Model Penelitian**

Penelitian ini menggunakan model yang sederhana dengan mereplikasi penelitian sebelumnya. Variabel independen penelitian ini yaitu tekanan



eksternal, sumber daya manusia, komitmen manajemen dan ketidakpastian lingkungan. Variabel dependen penelitian ini yaitu transparansi pelaporan keuangan. Penelitian ini menggunakan skala likert, untuk menguji variabel dependen yang dipengaruhi variabel independen menggunakan analisis regresi berganda.



**Gambar 1.1**  
**Model Penelitian**